

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*“Dukungan Teknologi pertanian dan Sumberdaya Finansial
dalam usaha mencapai Swasembada Pangan”*

Denpasar-Bali, 20 April 2018



Institusi Penyelenggara:

Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Magister Agribisnis, Universitas Udayana – Bali



UNIVERSITAS UDAYANA

SEMINAR NASIONAL

**Dukungan Teknologi Pertanian dan Sumberdaya Finansial dalam Usaha Mencapai
Swasembada Pangan**

Denpasar-Bali, 20 April 2018

PROSIDING

Editor:

Indardi

Widodo

Susanawati

Nur Rahmawati



Kerjasama antara:

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

dengan

Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis

Universitas Udayana Bali

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**DUKUNGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DAN SUMBERDAYA FINANSIAL
DALAM USAHA MENCAPAI SWASEMBADA PANGAN**

Denpasar-Bali, 20 April 2018

TIM PENYUSUN

Pengarah:

- » **Ir. Eni Istiyanti, MP**
- » **Dr. Aris Slamet Widodo, SP. MSc**

Editor:

- » **Ketua : Dr. Ir. Indardi, MSi**
- » **Anggota : Dr. Ir. Widodo, MP**
Dr. Ir. Nur Rahmawati, MP
Dr. Susanawati, SP. MP

Desain dan Tata Letak:

- » **Sigit Hariyanto, SP**

Diterbitkan oleh:

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Jl. Brawijaya Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55183
Telp : +62274 397656, Ext: 201
Faks : +62274 387646
E-mail : agribisnis@umy.ac.id, agribisnis.umy@gmail.com
Website : www.agribisnis.umy.ac.id

ISBN: 978 - 602 - 5450 - 44 - 0

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan kenikmatan yang telah kita terima, sehingga PROSIDING Seminar Nasional dengan tema Dukungan Teknologi Pertanian Dan Sumberdaya Finansial dalam Usaha Mencapai Swasembada Pangan dapat diterbitkan.

PROSIDING disusun berdasarkan hasil SEMINAR NASIONAL kerjasama antara Dua instansi yaitu Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UMY dengan Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis UNUD. Peserta terdiri dari tiga instansi yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UMY dengan Program Pasca Sarjana Magister Agribisnis UNUD yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Denpasar Bali. Penyelenggaraan seminar dimaksudkan untuk mendapatkan strategi dalam pemanfaatan teknologi pertanian serta sumberdaya finansial dalam usaha mencapai swasembada pangan. Dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut diperlukan berbagai kajian secara menyeluruh terkait teknologi budidaya terutama perbenihan, pembiayaan serta strategi peningkatan pendapatan petani.

Seminar melibatkan peneliti, dosen, dan mahasiswa yang mempersentasikan dua makalah utama dan 14 (empat belas) makalah pendamping sebagai presentasi poster.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada *keynote speech* Dr. I Wayan Budiasa, SP.,MP (Koordinator Pasca Sarjana Magister Agribisnis UNUD) dan pemakalah utama yaitu Dr. Ir. Indardi, M.Si (Dosen Program Studi Agribisnis UMY) dan Dr. I Gusti Komang Dana Arsana, SP., M.Si. (BPTP-Bali), tamu undangan serta para peserta seminar nasional. Tak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Program Studi Agribisnis UMY dan Pasca Sarjana Magister Agribisnis UNUD dan seluruh panitia atas terselenggaranya seminar dan terbitnya PROSIDING ini. Semoga Prosiding ini memberikan manfaat kepada Pemerintah Indonesia.

Yogyakarta, 2 Juli 2018
Ketua Panitia Seminar Nasional

Dr. Aris Slamet Widodo, SP, M.Sc.

SUSUNAN PANITIA

Penanggung Jawab : 1. Dekan (Ir. Indira Prabasari, MP. PhD)
2. Kaprodi Agribisnis (Ir. Eni Istiyanti, MP)

Ketua Pelaksana : Dr. Aris Slamet Widodo, SP., MSc.
Sekretaris : Heri Akhmadi, SP., MA.
Bendahara : Ir. Lestari Rahayu, MP.
Seksi Acara : Muhammad Fauzan, SP., MSc.
Seksi Makalah & Prosiding : Achmad Fachruddin, SE, M.S.
Seksi Akomodasi & Perkap : Oki Wijaya, SP., MP.
Seksi Dokumentasi & Korespondensi : Sigit Hariyanto, SP.

Keynote speech : Dr. I Wayan Budiasa, SP.,MP. (Magister Agribisnis-UNUD Bali)
Pemakalah Utama : 1. Dr. Ir. Indardi, M.Si. (Prodi Agribisnis, UMY)
2. I Gusti Komang Dana Arsana, SP. M.Si. (BPTP-Bali)

Reviewer Prodi Agribisnis UMY :

1. Dr. Ir. Indardi, M.Si
2. Dr. Susanawati, SP, MP
3. Dr. Ir. Nur Rahmawati, MP
4. Dr. Ir. Widodo, MP
5. Dr. Aris Slamet Widodo, SP, M.Sc
6. Dr. Ir. Triwara Buddhi Satyarini, MP
7. Dr. Ir. Sriyadi, MP
8. Ir. Eni Istiyanti, MP

Reviewer Pasca Sarjana Magister Agribisnis UNUD :

1. Dr. I Wayan Budiasa, SP, MP

Reviewer Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) :

1. Dr. Erwan Wahyudi, SP, M.Si
2. I Gusti Komang Dana Arsana, SP. M.Si
3. Ani Susilawati, SP, MP
4. I Ketut Mahaputra, SP, MP

LEMBAR KERJASAMA

Kesepakatan Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Nasional

Joint Conference Programme

Latar Belakang :

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015. Renstra tersebut telah menetapkan enam sasaran strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian di Indonesia, yaitu: swasembasa padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, juga peningkatan diversifikasi pangan.

Sasaran strategis lainnya adalah peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitutor (pengganti) impor, penyediaan bahan baku bio industri dan bio energi, serta peningkatan pendapatan keluarga petani. Strategi yang ditempuh adalah melalui peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, serta pengembangan dan perluasan logistik benih atau bibit serta penguatan jaringan pasar produk pertanian dan peningkatan dukungan perkarantinaan untuk memastikan keamanan produk impor yang masuk ke Indonesia.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut memerlukan berbagai kajian secara menyeluruh terkait teknologi budidaya terutama perbenihan, pembiayaan dan strategi peningkatan pendapatan petani.

Nama Program : *Joint Conference on Agriculture development*

Nama Kegiatan : Seminar Nasional

Tema Seminar : Dukungan Teknologi pertanian dan Sumberdaya Finansial dalam usaha mencapai Swasembada Pangan.

Institusi Penyelenggara :

- Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Magister Agribisnis, Universitas Udayana – Bali

Pelaksana Kegiatan : Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bentuk Kegiatan :

- Oral Presentation, tiga (3) Pemakalah Utama
- Poster Presentation, Pemakalah Pendamping.

Pemakalah Utama :

- Dr. Ir. Indardi, MS. (Prodi Agribisnis, UMY)
Topik: Kajian Kualitatif Strategi mencapai keberhasilan usahatani pada kelompok tani Manunggal, Bantul.
- Dr. I Gusti Komang Dana Arsana, SP. M.Si. (BPTP-Bali)
Topik: Peran perbenihan dalam upaya mencapai swasembada pangan
- Dr. I Wayan Budiasa, SP.,MP. (Prodi Magister Agribisnis – Udayana Bali)
Topik: Konsep dukungan financial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sifat Kegiatan : Seminar terbuka terhadap pemakalah lain dalam bentuk poster.

Kesepakatan Kerjasama Penyelenggaraan Seminar Nasional

Hari, Tanggal dan Waktu : Jumat, 20 April 2018; Jam 13.00 – 18.00 WITA

Kepanitiaan Kegiatan :

- Ketua : Dr. Aris Slamet Widodo, SP., MSc.
- Sekretaris : Heri Akhmadi, SP., MA.
- Bendahara : Ir. Lestari Rahayu, MP.
- Seksi Acara : Muhammad Fauzan, SP., MSc.
- Seksi Makalah & Prosiding : Achmad Fachruddin, SE, M.S.
- Seksi Akomodasi dan Perkap : Oki Wijaya, SP., MP.
- Seksi Dokumentasi & korespondensi: Sigit, SP.

Pendaftaran :

Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung F3 Lt. 1

Kampus Terpadu UMY

Jl, Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta - 55183.

Telepon : +62 274 387656 Ext. 202

Faks : +62 274 387646

Surel : [agribisnis@umy.ac.id/](mailto:agribisnis@umy.ac.id)

Contac Person Panitia: 085869742133/ 082227934624/ 085228732543

Batas Akhir Pendaftaran : 17 April 2018 (mengirim makalah lengkap)

Format Makalah : terlampir

Makalah dikirim ke : [agribisnis@umy.ac.id/](mailto:agribisnis@umy.ac.id) armando1215sw@gmail.com

Term of Reference (TOR) joint conference program ini telah disepakati bersama antara pihak-pihak terkait. Hal-hal yang belum diatur didalam TOR ini akan diatur kemudian dalam bentuk aturan pelaksanaan kegiatan seminar nasional.

Bali, 5 April 2018

Menyepakati Kerjasama,

Ketua Prodi Agribisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Eni Istiyanti, MP.


Ketua Prodi Magister agribisnis -
Universitas Udayana – Bali

I. Wayan Budiasa, SP.,MP


DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
SUSUNAN PANITIA.....	v
LEMBAR KERJASAMA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
1. Komunikasi Pembangunan Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah.....	1
Indardi.....	1
2. Peran Perbenihan Dalam Upaya Mencapai Swasembada Pangan.....	14
I Gusti Komang Dana Arsana.....	14
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.....	34
3. Perilaku Petani Terhadap Risiko Pada Usahatani Padi Organik di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.....	35
Eni Istiyanti, Sriyadi, Rahayu Dwiningsih.....	35
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Standar Operating Procedure-Good Agriculture Practise (SOP-GAP) Usahatani Padi Organik di Kulonprogo DIY.....	45
Sriyadi.....	45
5. Tingkat Prestasi Kerja Petani Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai.....	58
Aris Slamet Widodo, Francy Risvansuna Fifintari, Hanifah Purwanika.....	58
6. Aspek Ketahanan Pangan dan Program Desa Mandiri Pangan (Studi Kasus Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo).....	73
Triwara Buddhi Satyarini, Widodo, Harum Masithoh.....	73
7. Analisis Kelayakan Usahatani Padi Dengan Benih Bersubsidi di Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.....	85
Pujastuti Sulistyanning Dyah, Lestari Rahayu, Arien Sisca Maharani.....	85
8. Kelayakan Usahatani Padi Menggunakan Sistem Tanam Jajar Legowo di Kabupaten Bantul.....	96
Nur Rahmawati, Ahmad Fauzi, Triyono.....	96
9. Evaluasi Tingkat Keberhasilan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.....	111
Lestari Rahayu, Yulia Fransiska, Siti Yusi Rusimah.....	111
10. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pemasaran Produk Pertanian (Studi Literatur).....	130
Heri Akhmadi.....	130
UNIVERSITAS UDAYANA BALI.....	142
11. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Mendukung Terwujudnya Swasembada Pangan: Tinjauan <i>Dynamic Modelling</i>.....	143
Widhianthini.....	143

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)	153
12. Prospek dan Kebijakan Pengembangan Pinang Betara di Provinsi Jambi ..	154
Erwan Wahyudi	154
13. Teknologi Pengelolaan Lahan Pasang Surut Sulfat Masam Tipe Luapan B Untuk Tanaman Kedelai.....	167
Ani Susilawati ^{*)} , Masganti dan Erwan Wahyudi ^{*)}	167
14. Identifikasi Keunggulan Komparatif Komoditas Hortikultura di Seluruh Kabupaten/Kota Di Bali.....	187
Nyoman Ngurah Arya, I Ketut Mahaputra	187
15. Persepsi dan Adopsi Petani Dalam Penerapan PTT Padi Sawah di Bali	205
I Ketut Mahaputra dan Nyoman Ngurah Arya	205
16. Kajian Pemberian Pakan Tambahan Terhadap Induk Sapi Bali di Desa Bunga Mekar, Kec. Nusapanida, Kab. Klungkung	218
I Made Londra, Wayan Sudarma dan Putu Sutami	218
17. Pengaruh Pemberian Probiotik Terhadap Produktivitas Ayam Petelur di Desa Jhem Kabupaten Bangli	225
I W. Sudarma, AAN Badung Sarmuda Dinata, Desak Made Rai Puspa	225
18. Prevalensi Infeksi Cacing Gastrointestinal Pada Sapi Bali (Studi Kasus Pada Kawasan Komoditas Sapi Potong di Desa Pejarakan, Kecamatan Geroggak, Kabupaten Buleleng)	235
I Wayan Sudarma dan Made Londra	235
LAMPIRAN.....	247

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH

Indardi

Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
indardi@umy.ac.id

PENDAHULUAN

Pada akhir masa Orde Baru istilah pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer. Memasuki era reformasi dan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi pembangunan yang berdimensi kerakyatan semakin banyak diterapkan di tingkat kabupaten/kota. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menekankan pentingnya partisipasi semua lapisan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pada berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Komunikasi menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan khususnya melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa intensitas komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat relatif lebih tinggi dari pada dalam strategi pembangunan lainnya.

Konsep Komunikasi Pembangunan

Sejak penghujung tahun 60-an, di kalangan ilmu komunikasi telah berkembang suatu spesialisasi mengenai penerapan teori dan konsep komunikasi secara khusus untuk keperluan pelaksanaan program pembangunan. Pengkhususan itu kemudian dikenal dengan *komunikasi pembangunan*. Sementara di University of Philippine, Los Banos; yang dipandang sebagai cikal bakal tumbuhnya komunikasi pembangunan adalah disiplin ilmu *komunikasi pertanian*.

Kehadiran komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai suatu perwujudan respon kalangan disiplin komunikasi untuk menyumbang dan menerapkan ilmunya, dalam rangka ikut ambil bagian menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan. Pada hakekatnya perbedaan lahiriah antara kegiatan komunikasi pembangunan dengan yang “bukan komunikasi pembangunan” nyaris tidak kelihatan. Disebut sebagai komunikasi pembangunan apabila sudah benar-benar dikaitkan dengan tujuan suatu proyek pembangunan secara khusus atau dan program-program pembangunan nasional secara keseluruhan (Nasution, 1996).

Ada beberapa konsep dalam komunikasi pembangunan yang perlu diungkapkan pada kajian ini diantaranya; peliputan pembangunan (*development reporting*), komunikasi

pendukung pembangunan (*development support communication*), periklanan pembangunan (*development advertising*), serta penyuluhan khususnya penyuluhan pertanian (*agricultural extension*), dan penyuluhan koperasi (*cooperative extension work*). Berbagai konsep ini memiliki perannya masing-masing di dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Development reporting atau peliputan pembangunan muncul (di penghujung tahun 60-an) didasarkan pada keinginan untuk melaksanakan kebijakan pemberitaan yakni suatu kegiatan yang mendukung untuk meliput berbagai informasi atau peristiwa yang terkait dengan kegiatan pembangunan. Para pelopor / jurnalis yang peduli terhadap *development reporting* tersebut mendapat sebutan (dengan istilah) jurnalisme pembangunan. Setelah beberapa aktivitas yang diprakarsai oleh Juan Mercado (direktur Phillipine Press Institute), maka pada tahun 1967 didirikanlah *Press Foundation of Asia* yang mempromosikan jurnalisme pembangunan melalui sebuah kantor berita Depth news. Pada tahun 1968, Press Foundation of Asia menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan *development reporting* ini, yakni “ kursus latihan penulis ekonomi se Asia yang pertama kali. Dari hasil latihan tersebut perlu adanya penekanan bagi jurnalisme pembangunan di dalam melakukan *development reporting*, yakni tentang pentingnya materi pembangunan ekonomi di Asia dan teknik penulisan yang jelas.

Development support communication bersumber dari kalangan badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) : United National Development Programme (UNDP) di Bangkok. Komunikasi penunjang pembangunan dirancang oleh Erskine Childers untuk menunjang berbagai proyek pembangunan melalui program UNDP. Berdasarkan asal-usul istilah, menurut Gercelea komunikasi penunjang pembangunan disebut juga komunikasi penyuluhan/ komunikasi pertanian, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk menunjang pembangunan nasional dan local, khususnya di negara-negara berkembang. *Development support communication* adalah penggunaan berencana sumber-sumber (*resources*) informasi dan komunikasi (tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan media) oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan (Sumadi Dilla, 2007).

Istilah *development advertising* (periklanan pembangunan) diajukan relative belakangan. Kegiatan inilah yang kemudian meluas dan dicakup dalam konsep dan praktek komunikasi pembangunan seperti yang berkembang pada masa sekarang ini. Konsep *development advertising*, merujuk pada pengertian tindakan-tindakan promosi yang dilakukan pemerintah dan pihak lain dalam mempengaruhi masyarakat agar tergerak dan terlibat/berpartisipasi sesuai pesan yang dimuat dalam iklan tersebut.

Penyuluhan pertanian (*agricultural extension*) di Indonesia sebagai kegiatan telah ada semenjak didirikannya Kebun Raya Bogor oleh Reinwardt pada tahun 1817. Pada tahun 1905 dibentuk *Departement van Landbouw*, diantaranya bertugas melaksanakan penyuluhan. Disini penyuluhan ditujukan untuk menyalurkan hasil-hasil penelitian, pembagian bibit unggul, dan mengajarkan cara-cara perlindungan tanaman. Tahun 1910 dibentuk *Landbouw voorlichtingdienst* (LVD) yang pelaksana penyuluhannya tetap dilakukan Pangreh Praja. Baru tahun 1921, penyuluhan dilakukan oleh aparat LVD dan ternyata memberikan hasil yang baik. Akhirnya LVD dilepaskan dari Pangreh Praja dan dijadikan Dinas Daerah Propinsi yang secara teknis bertanggung jawab kepada *Departement van Landbouw* (Departemen Pertanian).

Kegiatan penyuluhan semakin berkembang dengan dibukanya sekolah-sekolah pertanian dan didirikannya AVB (*Algemene Volks Credietbank*) atau Bank Rakyat untuk menunjang pembiayaan pertanian. Pada era ini konsep penyuluhan pertanian lebih professional dengan tenaga penyuluh memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Dalam prakteknya system penyuluhan diterapkan secara “*olievleksystem*”, atau system tetesan minyak dengan pendekatan individual. Di era Orde Baru penyuluhan pertanian berperan sebagai ujung tombak dalam mensukseskan program-program pembangunan pertanian pemerintah. Penyuluhan pertanian adalah system pendidikan non formal untuk para petani dan keluarganya agar mereka mampu, sanggup dan berswadaya meningkatkan kesejahteraannya dan masyarakat sekitarnya (Padmanagara, dalam Suhardiyono, 1992).

Pemahaman *cooperative extension work* baik dari segi konsep/definisi dan prakteknya dari awal sampai dengan perkembangannya sekarang tidak akan lepas dari sejarah perkoperasian itu sendiri. Pada awalnya (permulaan abad 19) *cooperative extension work* dapat dipahami sebagai kegiatan/mengajak orang-orang yang memiliki nasib yang sama dengan kemampuan ekonomi yang terbatas serta akibat penderitaan social ekonomi yang timbul dari system kapitalisme yang cenderung *homo homini lupus*. Kemudian mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Konsep dan praktek *cooperative extension work* di Indonesia juga dinamis dan berkembang sesuai dengan sejarah pergerakan koperasi Indonesia. Kegiatan penyuluhan koperasi adalah untuk mengajak masyarakat menjadi anggota dan mengembangkan koperasi (Nasution, 1996).

Peranan Komunikasi Pembangunan Untuk Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya

serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat juga memberikan penguatan pada pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai modern seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung-jawaban, pembaruan lembaga-lembaga social, dan pengintegrasian ke dalam pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya adalah pokok dari upaya pemberdayaan ini. Yang sungguh penting adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya (Kartasasmita, 1996). Dalam proses pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang-berdayaan menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Peningkatan yang dituju tidak hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri manusia. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat). Pemberdayaan bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sebagai bahan kajian keilmuan sudah relative agak lama, namun dalam terapannya sebagai kebijakan (untuk strategi pembangunan di Indonesia) baru mencuat pada akhir-akhir sebelum masa Orde Baru runtuh oleh ketua Bapenas Ginanjar. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai sebuah strategi pembangunan yang berakar kerakyatan.

Dengan berdasar pada konsep pemberdayaan masyarakat tsb, bisa dikaji bagaimana peranan komunikasi pembangunan terhadapnya. Setiap konsep yang ada dalam komunikasi pembangunan (*development reporting, development support communication, development advertising, agricultural extension, dan cooperative extension work*) memiliki peranannya masing-masing pada level dan bidang singgung yang beragam dengan pemberdayaan masyarakat.

Development reporting akan memberikan tambahan informasi yang lebih objektif dari suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah (atau pihak lain). *Development reporting* memiliki peran komplementer ataupun mensubstitusi melalui temuan lapang baru dari suatu laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di sini peliputan pembangunan bisa berperan membantu mengungkapkan berbagai permasalahan dan potensi masyarakat atau informasi lain yang belum dilaporkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Development reporting* akan memberikan masukan dan koreksi bagi pemerintah daerah maupun pusat, yang akhirnya akan melahirkan kebijakan

dan program-program pemerintah yang lebih baik lagi (yang mengakomodasi permasalahan yang sebenarnya di tingkat lapangan) untuk diterapkan dalam program pembangunan pada tahap / tahun berikutnya.

Peran penting *development support communication* adalah bagaimana memanfaatkan berbagai *resources* dan sarana komunikasi yang dikuasai oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk dikelola secara lebih terencana untuk efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat. Para *change agent* (pemerintah dan elemen masyarakat lainnya) saling bertukar informasi yang bisa dijadikan dasar atau bahan pemikiran untuk kegiatan pemberdayaan.

Untuk persoalan-persoalan tertentu yang belum banyak diketahui oleh publik, sementara *change agent* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memandang *urgent* untuk diketahui umum dan atau dipandang perlu penanganan segera, maka melalui *development advertising* merupakan sarana yang dipandang membantu. Peran promosi ini bisa dilakukan melalui komunikasi massa, melalui komunikasi kelompok (misalnya: melalui jaringan kerja sama LSM, atau jaringan kerja sama penggerak pemberdayaan masyarakat), atau komunikasi interpersonal (hubungan telepon, presentasi, pengajuan proposal dsb).

Istilah penyuluhan bisa diterapkan untuk berbagai bidang, namun penulis memandang penting untuk membahas penyuluhan pertanian dan koperasi. *Agricultural extension* memiliki peran penting dalam Pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal kepada masyarakat tani, dan masyarakat tani merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Penyuluhan pertanian merupakan factor pelancar dalam pembangunan pertanian. Hal mana pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan bidang ekonomi. Penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam upaya peningkatan SDM khususnya terhadap masyarakat tani, melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perbaikan ketrampilan dalam penerapan berbagai teknologi dan inovasi pertanian. Penyuluhan pertanian mempunyai orientasi/ tujuan tidak hanya meningkatkan ekonomi tapi juga aspek social, peningkatan harkat dan martabat manusia. Jadi secara substansial melakukan penyuluhan dalam arti yang sebenarnya berarti melakukan pemberdayaan masyarakat tani dalam arti yang sebenarnya pula.

Bisa dikatakan bahwa *cooperative extension work* merupakan salah satu aktivitas (melalui ajakan, anjuran, penjelasan-penjelasan, promosi, dan sebagainya) dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui koperasi. Sementara pemberdayaan masyarakat melalui koperasi ini bagian dari pemberdayaan masyarakat Indonesia (yang meliputi berbagai aspek/ bidang garap, dan pertanian masuk di dalamnya). Peran *cooperative extension*

work dengan pemberdayaan masyarakat mirip dengan penyuluhan pertanian dengan bidang singgung yang lebih luas (pertanian, jasa, industri, pedagang, wiraswasta, pegawai negeri, dsb). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan (kerakyatan) secara makro. *Cooperative extension work* merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mereka sendiri sebagai anggota, dan koperasi sebagai media perjuangannya.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Praktek

Nampaknya agak sulit untuk mengkategorikan apakah program pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat ataukah tidak. Memang mudah untuk mengatakan bahwa pembangunan pabrik pupuk kimia, dan proyek mobil nasional bukanlah pembangunan yang didasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat. Namun untuk program-program pembangunan yang lainnya yang bisa dirasakan adalah derajat atau kadarnya. Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada awal dan pertengahan masa Orde Baru (tahun 60-an dan tahun 70-an) nampak memiliki konsep pemberdayaan masyarakat yang rendah. Namun sudah didasarkan pada kondisi dan situasi masyarakat pada masanya, setidaknya menurut kacamata pemerintah. Setiap program-program pembangunan selalu seragam untuk seluruh wilayah Indonesia, sementara pada kenyataan berbagai daerah memiliki keanekaragaman, baik menyangkut kondisi fisik wilayah (topografi, jenis tanah, kondisi dan ketersediaan air, dsb) maupun kondisi social-ekonomi dan budaya masyarakatnya. Setiap daerah memiliki sumber daya fisik, sumber daya nabati dan hewani, serta sumberdaya manusia yang bervariasi. Program pembangunan yang memiliki derajat pemberdayaan yang dirasa rendah misalnya adalah: pembangunan cengkeh melalui BPPC, program Bimas padi (program swa sembada beras), model penyuluhan Lakusi (latihan kunjungan dan supervise), program Tebu Rakyat Intensifikasi (program swa sembada gula), program KB, program lahan pertanian sejuta hektar, program transmigrasi, dsb-nya. Memang program Bimas padi melibatkan semua petani di Indonesia, namun semata sebagai objek pembangunan.

Jika dibanding program pembangunan yang lahir pada periode akhir masa Orde Baru (tahun 80-an dan tahun 90-an), nampak bisa dirasakan bahwa dalam periode ini lebih memiliki derajat pemberdayaan masyarakat yang relative lebih lebih baik; seperti: program PHT (pengendalian hama terpadu) dengan SLPHT (sekolah lapangan pengendalian hama terpadu)-nya, program JPS (Jaring Pengaman Sosial), program IDT (Inpres Desa Tertinggal), program P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil), dan

sebagainya. Walaupun perencanaan dan pelaksanaannya diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, namun dalam kegiatannya dilapangan masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkreasi.

Terlihat bahwa program pembangunan dengan tingkat pemberdayaan yang rendah memberi peluang tinggi untuk gagal total (misalnya: BPPC, program TRI, proyek lahan pertanian sejuta hektar), berhasil dengan baik tetapi tidak sustain/berlanjut (misal: program Bimas padi: swa sembada beras). Sementara Lakusi seperti hidup tidak, dan kalau dikatakan matipun juga tidak. Latihan Kunjungan dan Supervisi (Lakusi) adalah suatu system penyuluhan yang terorganisasikan secara tertentu dan dengan system kerja yang tertentu pula, yang pertama kali diterapkan sejak tahun 1975/1976 di propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. System kerja dalam Lakusi adalah bahwa seorang penyuluh (PPL) membimbing sejumlah 16 kelompok tani di wilayah kerja (WKPP)-nya. Pada minggu I, II, III dan III, hari Senin sampai Kamis, PPL melakukan *kunjungan* ke kelompok pertama(1) hingga kelompok enam belas (16), jadi setiap hari mengunjungi dua (2) kelompok tani. Pada Hari Jumat minggu I, II, III dan IV dilakukan *latihan* di BPP/kabupaten yang dipimpin oleh PPS, PPM, diskusi, mengerjakan adimisntrasi dll. Sedangkan Hari Sabtu minggu I, II, III dan IV biasanya untuk berbagai kegiatan kunjungan pengganti, menengok pengujian, pengerjaan administrasi yang belum selesai, dsb. Sedangkan *supervisi* adalah pelaksanaan pemantauan berbagai kegiatan penyuluhan yang dilakukan PPL baik dalam kegiatan *latihan* (dan terutama) maupun *kunjungan*, oleh seorang Supervisor maupun oleh instansi yang memiliki wewenang melakukan tugas ini. Hanya program KB (Keluarga Berencana), yang berhasil dengan baik, dan berlanjut (menjadi pola dalam kehidupan keluarga: keluarga kecil, cukup dua anak) walaupun program tersebut telah dihentikan.

Sedangkan program pembangunan dengan derajat pemberdayaan masyarakat yang dirasa lebih baik, prestasinya tidak seheboh swa sembada beras. Namun kita juga tidak menemukan program yang gagal total. Program PHT berhasil dengan baik, dan berlanjut sampai sekarang (walaupun sudah tidak ada proyek SLPHT). Misalnya Ada ketrampilan dasar yang harus dikuasai petani dari penyelenggaraan SLPHT yakni: a) pengenalan dan kemampuan mengidentifikasi musuh alami, hama, maupun pola penyerangannya yang dapat dilepalajari melalui analisis system; b) pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan manfaat dan pembiayaannya dalm usahatani. Hal ini masih tetap melekat dan menjadi dasar acuan petani dalam bertindak terkait dengan usahatani. Bahkan orang mulai mengarah pada produk-produk organic. Sementara program-program pembangunan yang lainnya, cukup memberi efek yang baik, walaupun proyek tersebut telah selesai.

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) merupakan proyek pendidikan bagi petani nelayan kecil (PNK) yang tergabung dalam kelompok petani-nelayan kecil (KPK) yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan. P4K berjalan dalam kurun waktu yang relative lama untuk suatu proyek, yakni sejak akhir tahun 1979 sampai akhir tahun 2005, yang pendanaannya dari APBN, sebagian dari pinjaman ADB serta IFAD. Secara makro kegiatan ini meliputi 3 proses kegiatan, yakni: proses penumbuhan KPK, proses penguatan kapasitas KPK dan proses monitoring-evaluasi. Ada 7 *guidance principle* dalam penumbuhan dan penguatan kapasitas PNK, yakni: partisipatif, keswadayaan, keserasian, kepemimpinan dari mereka sendiri, kesatuan keluarga, belajar menemukan sendiri (*discovery learning*), dan kemandirian. Serta dengan 15 langkah dalam penumbuhan dan pembinaan PNK-nya seperti: identifikasi dan pemilihan lokasi, sensus rumah tangga miskin, konsultasi, *participatory rural appraisal* (PRA), pembentukan KPK, penentuan pelaku penumbuhan KPK, pembentukan dan pengembangan diri anggota yang aktif, pemupukan dan pengembangan dana bersama kelompok, pemantapan dan pengembangan usaha anggota dan kelompok yang menguntungkan, perintisan dan pemantapan jalinan hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak lain, sampai akhirnya pada tahap pemandirian kelompok untuk mewujudkan KPK yang mandiri. Akhirnya tercapai graduasi PNK, yakni PNK yang memiliki pendapatan keluarga per kapita per tahun melampaui garis kemiskinan. Dan juga secara berkelompok atau individual telah memiliki akses ke sumber layanan permodalan, lingkup pasar yang luas dan bantuan teknik yang diperlukan untuk pengembangan usaha dengan mekanisme pasar. Proyek P4K inilah dapat dijadikan contoh sebagai program pembangunan yang lebih mendekati dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya.

Proyek P4K menunjukkan sebuah konsep pemberdayaan yang nampaknya paling ideal. Hal mana program ini mencoba mengenali permasalahan kemiskinan dan mencoba mengangkatnya berdasarkan situasi dan kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi petani-nelayan kecil di pedesaan. Proyek nampak di desain secara lebih serius dengan *guidance principle* yang benar-benar berangkat dari nilai-nilai rakyat kecil. Langkah-langkah penumbuhan dan penguatan KPK-nyapun terlihat teliti. Walaupun program ini dilahirkan di masa Orde Baru, nampak ada dinamika dan kreativitas di lapangan dalam pelaksanaan program P4K tsb terutama selepas jatuhnya Orde Baru.

Pendekatan Komunikasi Pembangunan Di Era Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (MPR RI, 2003). Semangat Otonomi Daerah telah melahirkan tiga buah Undang-Undang penting, yakni UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU No 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta dilengkapi dengan juklak Otda baik berupa Kepres maupun Peraturan Pemerintah.

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja (MPR RI, 2003). Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Daerah (bupati/ walikota) untuk menyelenggarakan pemerintahan kabupaten/kota berdasar kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD II. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Selanjutnya dalam pasal 62 UU No22 Tahun 1999 diungkapkan bahwa unsur pelaksana pemerintah daerah dilakukan oleh dinas daerah. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat oleh kepala Daerah. Sehingga kepala dinas bertanggung jawab pada kepala daerah (bupati).

Setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah (*communication as action*), komunikasi sebagai interaksi (*communication as interaction*) dan komunikasi sebagai transaksi (*communication as transaction*) (West and Turner, 2007; Mulyana, 2007). Dalam era desentralisasi dan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negaranya, maka konsep komunikasi lebih ditekankan pada komunikasi sebagai transaksi dan interaksi dari pada komunikasi sebagai tindakan satu arah. Komunikasi sebagai tindakan satu arah hanya digunakan dalam konteks komunikasi (pembangunan) yang sudah didahului oleh kesepakatan berbagai pihak dalam komunikasi transaksi atau interaksi sebelumnya.

Proses komunikasi pembangunan akan lebih terbuka bagi semua pihak yang berkompeten untuk secara pro aktif ikut berpartisipasi. Namun perlu disadari bahwa kemampuan kabupaten/kota antara yang satu dengan daerah yang lain memiliki perpaduan SDA, SDM, sumber daya modal dan prasarana yang berbeda-beda; maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses komunikasi pembangunan secara keseluruhan. Namun jelas mengarah pada pemahaman komunikasi sebagai transaksi dan interaksi dari pada sebagai tindakan satu arah.

Demikian juga pendekatan komunikasi pembangunan di era otonomi lebih mengarah pada pola komunikasi bottom-up atau setidaknya kombinasi antara bottom-up dan top-

down dari pada semata-mata pendekatan top-down. Hal ini pun juga akan sangat beragam antara kotasabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan komposisi berbagai sumber daya (*resources*) setempat, khususnya bagaimana profil SDM birokrat dan masyarakatnya. Terkait dengan profil SDM, yang dapat berpengaruh terhadap dinamika dan arah perkembangan pola komunikasi pembangunan yang terjadi akan berkaitan dengan aspek demografis (struktur usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, dsb), aspek psikografis (seperti motivasi, kepribadian, sikapnya terhadap pembaharuan, sikapnya terhadap informasi atau inovasi baru dsb), dan aspek sosiografis (hubungan social, kehidupan berorganisasi, kekosmopolitan, kepedulian terhadap persoalan sekitar, empathy, solidaritas, dsb).

KESIMPULAN

Kehadiran komunikasi pembangunan memberikan kontribusi terhadap berbagai pemecahan masalah komunikasi dalam program-program pembangunan. Seiring dengan kompleksitas permasalahan pembangunan, maka berkembang pula konsep-konsep yang ada dalam komunikasi pembangunan tersebut, diantaranya adalah *development reporting*, *development support communication*, *development advertising*, serta penyuluhan khususnya *agricultural extension*, dan *cooperative extension work*. Masing-masing konsep dalam komunikasi pembangunan tersebut memiliki peran yang penting dan berbeda satu dengan lainnya dalam menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Hal mana pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan yang berakar kerakyatan.

Pada kenyataannya di lapangan banyak program pembangunan yang kurang di dasarkan pada konsep pemberdayaan masyarakat. Setelah Orde Baru dan memasuki era reformasi dan Otonomi Daerah, konseptualisasi komunikasi bergeser dari konsep komunikasi yang cenderung sebagai tindakan linear (satu arah), menuju konsep komunikasi sebagai proses transaksional dan interaksional. Demikian pula pendekatan komunikasi pembangunannya, bergeser dari *pola top-down* semata bergeser kearah *bottom-up* atau setidaknya kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini memberikan angin segar terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam arti yang sebenarnya, sehingga kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan yang seharusnya dikehendaki masyarakat. Penting dimunculkan konsep baru tentang pendekatan komunikasi yang sesuai dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan di era otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji; Ninik Widiyanti. 2003. *Dinamika Koperasi; Diterbitkan dengan Kerjasama Binaadiaksara dan Rineka Cipta*, Jakarta.
- Ban, AW van dn; HS Hawkins, 1996. *Agricultural Extension, Second Edition Blackwell Science, Osney Mead, Oxford.*
- BPLP. 1999. *Matriks Perencanaan Proyek P4K, Final Draft 30 November 1999; Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, Jakarta.*
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu; Simbiosis Rekatama Media, Bandung.*
- Firdaus, Muhammad; Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek; Ghalia Indonesia, Bogor.*
- Gallagher, Kevin D.; dkk. 1991. *Buku Petunjuk Lapangan untuk Pengendalian Hama Terpadu Padi; Proyek Prasarana Fisik Bappenas, Jakarta.*
- Gallagher, Kevin D.; Latifa Nurhidayati 1991. *Buku Petunjuk Lapangan untuk Pengendalian Hama Terpadu Palawija; Proyek Prasarana Fisik Bappenas, Jakarta.*
- Hendrojogi, 2004. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktek, Edisi Revisi; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan; Bappenas, Jakarta.*
- Kartasapoetra, AG. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian; diterbitkan oleh Bumi Aksara, Jakarta.*
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian; Sebelas Maret University Press, Surakarta.*
- MPR RI, 2003. *Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No 22, 25 dan 28 tahun 1999), Citra Umbara, Bandung.*
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.*
- Nasution, Z. 1990. *Prinsip Prinsip Komunikasi untuk Penyuluhan; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Nazution, Z. 1996. *Komunikasi Pembangunan, Pengenaln Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi; Raja Grafindopersada, Jakarta.*
- Rogers EM. 1976. *Komunikasi dan Pembangunan, Perspektif Kritis; Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosialj Jakarta.*
- Soekartawi, 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian; Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.*

- Soekartawi, 1996. *Pembangunan Pertanian untuk Mengentas Kemiskinan*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekartawi, 2005. *Agribisnis, Teori dan Aplikasinya*; diterbitkan PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhardiyono, L. 1992. *Penyuluhan, Petunjuk bagi Penyuluh Pertanian*; Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Suwandi, 2003. *Petunjuk Teknis (Juknis) Penumbuhan dan Penguatan Kapasitas Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK)*; Departemen Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian, P4K, Jakarta.
- Untung, Kasumbogo. 1996. *Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu*; Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto, 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- West, R; Lynn H. Turner. 2007. *Introducing Communication Theory, Analysis and Application*, Third Edition, McGraw-Hill, New York.
- Widayati. 2004. *Pengalaman Membantu Petani-Nelayan Kecil dan Penduduk Miskin di Perdesaan Melalui Pola P4K (menyuburkan harapan di lading-ladang kecemasan) di Kabupaten Purwakarta*.